

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

**KABUPATEN
BANGKA BARAT
MENURUT PENGELUARAN**



2014-2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

**KABUPATEN
BANGKA BARAT
MENURUT PENGELUARAN**



2014 - 2018

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANGKA BARAT
MENURUT PENGELUARAN
2014–2018**

ISBN : 978-602-5661-03-7

Nomor Publikasi : 19030.1802

Nomor Katalog : 9302023.1903

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 84 halaman

Naskah:
BPS Kabupaten Bangka Barat

Gambar Kulit:
BPS Kabupaten Bangka Barat

Diterbitkan Oleh:
© BPS Kabupaten Bangka Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat.

TIM PENYUSUN

Pengarah : Zainubi, S.Sos

Penulis : Yuyun Wahyuningtyas, SST

Editor : Sari Sisilianingsih. SST

Design Cover : Livio Mayesta, S.ST

<https://bangkabaratkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota) pada periode waktu tertentu. Data ini juga dapat digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), perkembangan investasi fisik (ICOR), kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*).

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB dengan pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* sesuai rekomendasi *United Nations*.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, masukan yang konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan publikasi selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Muntok, September 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bangka Barat,

Zainubi, S.Sos

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	3
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	5
II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	24
2.6 Ekspor dan Impor	27
III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA BARAT MENURUT PDRB PENGELUARAN, 2014-2018	33
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Pengeluaran	33
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	39
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	44
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	46
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	48
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	50
3.7 Perkembangan Ekspor dan Impor	52
IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BANGKA BARAT MENURUT PENGELUARAN, 2014-2018	59
4.1 PDRB (Nominal)	59
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	60
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	61
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	62

4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	64
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	65
4.7	Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan	65
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	67
4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	68
V	PENUTUP	73
	LAMPIRAN	77

<https://bangkabaratkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Miliar Rupiah), 2014-2018 34
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Miliar Rupiah), 2014-2018 34
Tabel 3.3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018 36
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018 37
Tabel 3.5	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018 38
Tabel 3.6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018 40
Tabel 3.7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018 42
Tabel 3.8	Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018 43
Tabel 3.9	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018 44
Tabel 3.10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018 45
Tabel 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018 47
Tabel 3.12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018 49
Tabel 3.13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018 51
Tabel 3.14	Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018 53

Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	60
Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	61
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	62
Tabel 4.4	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	63
Tabel 4.5	Rasio Ekspor Terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	64
Tabel 4.6	Rasio PDRB Terhadap Impor Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	65
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	66
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	67
Tabel 4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Miliar Rupiah), 2014-2018	35
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018	38
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018	41
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi LNPRT Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018	46
Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018	47
Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan dan Peranan PMTB Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018	50
Gambar 3.7 Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018	52
Gambar 3.8 Laju Pertumbuhan dan Peranan Ekspor Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018	54
Gambar 3.9 Laju Pertumbuhan dan Peranan Impor Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (persen), 2014-2018	54
Gambar 4.1 PDRB per Kapita Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Ribu Rupiah), 2014-2018	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2014-2018	77
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2014-2018	78
Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2014-2018.....	79
Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2014-2018.....	80
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2014-2018.....	81
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2014-2018.....	82
Lampiran 7. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat Menurut Pengeluaran (persen), 2014-2018.....	83
Lampiran 8. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat Menurut Pengeluaran (persen), 2014-2018.....	84



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah sebagai indikator penting untuk memonitor perekonomian secara makro. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dari angka PDRB dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perubahan struktur ekonomi, pendapatan per kapita, konsumsi, investasi, dan variabel ekonomi makro lainnya. Dalam perkembangannya, PDRB sudah dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah.

PDRB dinilai menggunakan dua pendekatan, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan PDRB tipe ini sangat bermanfaat untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Penyusunan PDRB dapat menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu menurut pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.

A. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Pengalihan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6.

Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

B. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

C. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Penyusunan PDRB terus mengalami penyempurnaan terutama dari segi cakupan data dan metodologi penghitungan yang digunakan. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan tahun dasar tahun tertentu, diganti sesuai dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia dan mengikuti saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengubah tahun dasar setiap 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 6 (enam)

kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, 2000, dan 2010. Mulai tahun 2015 digunakan tahun dasar yang baru yaitu tahun 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia relatif stabil
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru
- Rekomendasi PBB tentang perubahan tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index/PPI*)
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Dari perhitungan PDRB ADHB dan ADHK diperoleh tabel turunan PDRB seperti: distribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, indeks implisit, dan PDRB per kapita. Manfaat yang dapat diperoleh dari data-data tersebut antara lain adalah:

- PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
- PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

- Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://bangkabaratkab.bps.go.id>



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor institusi dalam total ekonomi dikelompokkan ke dalam lima sektor, yaitu: korporasi finansial, korporasi non finansial, pemerintahan umum, rumah tangga, dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Sektor rumah tangga mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan nilai konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

A. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

B. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut 12 COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

- a) Makanan dan minuman non alkohol
- b) Minuman beralkohol dan rokok
- c) Pakaian dan alas kaki

- d) Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lain
- e) Furnitur, peralatan rumah tangga, dan perbaikan rutin rumah
- f) Kesehatan
- g) Transportasi/angkutan
- h) Komunikasi
- i) Rekreasi dan kebudayaan
- j) Pendidikan
- k) Penginapan, hotel, dan restoran
- l) Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

- a) Makanan, Minuman, dan Rokok
- b) Pakaian dan Alas Kaki
- c) Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- d) Kesehatan dan Pendidikan
- e) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- f) Hotel dan Restoran
- g) Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).



Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

C. Penghitungan PKRT Tahunan

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk kelompok makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (baik dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2) Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas

dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dilakukan menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB masing-masing kelompok COICOP dengan IHK tahun dasar 2010 dari masing-masing kelompok COICOP yang sesuai.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah dalam penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - i) Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - ii) Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
- b. Terhadap data poin a dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
- c. Data poin b dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
- d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
- e. Susun indeks implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- f. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin d dengan hasil poin e.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).



A. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi sosial (orsos), organisasi profesi (orprof), perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa (OBK).

B. Cakupan

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contohnya: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar,

perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.

- Kompensasi tenaga kerja, contohnya: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya
- Penyusutan
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contohnya: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

C. Penghitungan PKLNPRRT Tahunan

1) Sumber Data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2) Metode Penghitungan

Metode estimasi PKLNPRRT menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PKLNPRRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT ADHB

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKLNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dilakukan menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara *men-deflate* PKLNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir, sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

A. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

B. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup : a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, merupakan pengeluaran yang diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, *social security*, *sports*, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya)
- Pengeluaran konsumsi untuk kolektif, merupakan pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan barang publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi, *Resource and Development*, dan sebagainya).



Pengeluaran pemerintah meliputi:

- Administrasi umum
- Pelayanan pemerintah (gratis atau hampir gratis) seperti pendidikan, kesehatan serta jasa lainnya
- Lembaga non profit yang utamanya dikontrol dan dibiayai oleh pemerintah
- Pengeluaran pemerintah sebagai transfer berupa barang
- Belanja/pembelian makanan/minuman oleh pemerintah untuk membantu korban bencana.

Klasifikasi ekonomi konsumsi akhir pemerintah meliputi:

- Konsumsi antara
- Balas jasa tenaga kerja
- Konsumsi barang modal
- Penjualan (output pasar/market output)
- Transfer berupa barang
- *Own account capital formation*
- *Gross capital formation (purchased) Subsidies*
- *Property income*
- *Social benefits other than in kind*
- Transfer berjalan lainnya
- Transfer modal/*capital*

C. Penghitungan PKP Tahunan

1) Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP Kabupaten Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu atau DPPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan

- IHPB umum tanpa ekspor, indeks upah, indeks implisit PMTB, dan IHK umum dari BPS.

2) Metode Penghitungan

a. PKP Kabupaten/Kota ADHB

Secara umum, Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP) ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PKP Kabupaten/Kota ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

b. PKP Kabupaten/Kota ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.



2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB merupakan nilai arus barang modal yang terjadi akibat penambahan barang modal baru dikurangi pengurangan barang modal bekas, ditambah perbaikan besar atas barang modal atau aset tetap dan biaya transfer/pemindahan kepemilikan atas aset-aset yang tidak diproduksi. Sementara perubahan inventori merupakan perubahan kuantitas bahan baku, penolong, barang jadi dan setengah jadi maupun suku cadang yang dikuasai oleh perusahaan.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Aset tetap merupakan aset penting yang menunjang kegiatan produksi yang digunakan berulang kali atau berkelanjutan dalam proses produksi lebih dari satu tahun dan bernilai relatif mahal. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

Penambahan aset tetap atau yang dikenal sebagai PMTB pada prinsipnya diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada suatu kegiatan ekonomi, sehingga penghitungan PMTB menjadi sangat penting untuk mengukur efisiensi yang dicapai oleh suatu aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

A. Konsep dan Definisi

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sementara pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain.

Sebagai pengecualian, kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

B. Cakupan

Dalam publikasi ini, PMTB dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Bangunan dan Non bangunan. PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, sistem persenjataan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan hutan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

C. Penghitungan PMTB Tahunan

1) Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Hasil Survei Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah dari BPS.
- c. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- d. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Direktorat Statistik Industri (pada level provinsi).
- e. Laporan keuangan perusahaan.



- f. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- g. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- h. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian.
- i. Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum.
- j. Publikasi Statistik Konstruksi.
- k. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Dinas Pertambangan dan Energi.
- l. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.
- m. Statistik Perkebunan, Ditjen Perkebunan.
- n. Statistik Kendaraan Bermotor, Samsat.
- o. Statistik Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

2) Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sementara pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau suplai dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

a. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK digunakan metode deflasi yaitu dengan cara PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (suplai), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. *Pertama*, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK digunakan metode deflasi yaitu dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan *kedua*, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB digunakan metode produksi dengan cara nilai PMTB ADHK tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal

tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sementara PMTB ADHK-nya diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADHK diperoleh dengan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sementara data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK-nya diperoleh menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan sebagai sub komponen investasi sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan sebagai komponen aset atau harta lancar perusahaan. Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

A. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sementara bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas

(publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

B. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

C. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.

- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan atau Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

2) Metode Penghitungan

Ada 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara lebih rinci dan berkesinambungan.

a. Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADHK menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHB dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.



b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHB dihitung dengan: a. *men-deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari luar daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa.

Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

A. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Pada dasarnya metode pengukuran jenis transaksi eksternal (baik antar negara maupun antar daerah) memiliki kesamaan prinsip, dalam artian yang satu akan menambah jumlah PDRB dan yang lainnya akan mengurangi jumlah PDRB. Perbedaan yang sangat mendasar adalah dalam hal penilaian, karena menyangkut alat pembayaran.

B. Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
- Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.
- Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

C. Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1) Sumber Data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia



2) Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri ADHB dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sementara Import barang luar negeri ADHB dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-import jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-import tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sementara net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran. Penghitungan ekspor-import barang dan jasa luar negeri ADHK dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB menurut jenis barang untuk ekspor-import barang luar negeri dan IHK jasa untuk ekspor import jasa luar negeri sebagai deflatornya.



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA BARAT MENURUT PDRB PENGELUARAN 2014-2018



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA BARAT MENURUT PDRB PENGELUARAN, 2014-2018

Proses pembangunan ekonomi berdampak pada perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sementara faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan sebagai akibat peningkatan transaksi perdagangan.

Setiap komponen pengeluaran yang mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Bangka Barat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BANGKA BARAT MENURUT PENGELUARAN

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan bagaimana pendapatan yang diciptakan dalam proses ekonomi dari berbagai sektor produksi digunakan masyarakat untuk konsumsi akhirnya. Dengan kata lain, PDRB menurut pengeluaran menjelaskan mengenai penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir atau output final (*final output*). Pengguna konsumsi akhir ini adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi di wilayah domestik.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat dapat digambarkan melalui agregat PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang positif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 10.687 Miliar Rupiah, meningkat menjadi 13.833 Miliar Rupiah pada tahun 2018.

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Miliar Rupiah), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.468	5.010	5.701	6.461	7.118
2. Konsumsi LNPRT	47	54	63	70	82
3. Konsumsi Pemerintah	590	653	744	825	881
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.808	1.994	2.288	2.663	2.913
5. Perubahan Inventori	265	256	120	90	101
6. Ekspor	15.965	13.565	11.891	15.045	16.669
7. Impor	12.457	10.059	8.557	11.933	13.931
PDRB	10.687	11.473	12.249	13.221	13.833

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 (ADHK 2010). Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Miliar Rupiah), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.349	3.545	3.788	4.006	4.217
2. Konsumsi LNPRT	38	40	44	47	51
3. Konsumsi Pemerintah	461	479	498	529	540
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.313	1.372	1.437	1.531	1.618
5. Perubahan Inventori	172	180	80	54	63
6. Ekspor	14.923	12.770	11.163	14.576	14.404
7. Impor	11.908	9.617	7.821	11.068	10.716
PDRB	8.349	8.770	9.190	9.674	10.176

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Seperti halnya pada ADHB, hampir seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun khususnya selama tahun 2014-2018. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 8.349 Miliar Rupiah, meningkat menjadi 10.176 Miliar Rupiah pada tahun 2018.

Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Miliar Rupiah), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Semakin lama perbedaannya semakin besar. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Semakin besarnya perbedaan PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang terjadi lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB tersebut.

Pembentukan PDRB tidak terlepas dari kontribusi semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPR (PKLNPR), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Pada tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2014-2018, produk barang dan jasa yang dihasilkan sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 40 persen bahkan mencapai 51,46 persen pada tahun 2018). Peranan ekspor terhadap

pembentukan PDRB juga relatif besar dengan kontribusi lebih dari 100 persen dari tahun 2014-2018, walaupun sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi 97,07 persen namun kembali meningkat di tahun 2017 hingga mencapai 120,50 persen pada 2018. Tingginya peranan ekspor ini terjadi akibat adanya fenomena *re-export*. Komoditas ekspor yang menjadi andalan Kabupaten Bangka Barat adalah logam timah, CPO, dan karet. **Tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka Barat akan produk dari wilayah lain hingga tahun 2017 juga cukup tinggi yaitu sekitar 91,16 persen dari total PDRB.**

B b

Tabel 3.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	41,81	43,67	46,54	48,87	51,46
2. Konsumsi LNPRT	0,44	0,47	0,51	0,53	0,59
3. Konsumsi Pemerintah	5,53	5,69	6,08	6,24	6,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,92	17,38	18,67	20,14	21,06
5. Perubahan Inventori	2,48	2,23	0,98	0,68	0,73
6. Ekspor	149,39	118,24	97,07	113,79	120,50
7. Impor	116,57	87,68	69,85	90,25	100,71
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 16-21 persen. Kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada kisaran 5-6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar, masih berada di bawah kontribusi konsumsi rumah tangga, ekspor, dan PMTB. Sementara itu, komponen yang peranannya paling kecil adalah konsumsi LNPRT, dimana kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Bangka Barat tidak mencapai 1 persen selama kurun waktu 2014-2018. Selama kurun waktu lima tahun, neraca perdagangan Kabupaten Bangka Barat menunjukkan posisi surplus, dimana nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor.

Agregat makro lainnya yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah, rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor.

Selama tahun 2014-2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,26 dan sedikit mengalami perlambatan di 2018 dengan pertumbuhan sebesar 5,19 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 4,80 persen.

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,59	5,86	6,86	5,73	5,28
2. Konsumsi LNPRT	11,36	5,16	9,09	5,81	8,66
3. Konsumsi Pemerintah	4,45	3,87	4,01	6,15	2,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,72	4,48	4,74	6,54	5,64
5. Perubahan Inventori	9,81	4,54	-55,47	-32,90	17,38
6. Ekspor	12,30	-14,43	-12,58	30,57	-1,18
7. Impor	15,11	-19,24	-18,67	41,52	-3,18
PDRB	4,72	5,03	4,80	5,26	5,19

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selain pertumbuhan ekonomi, agregat makro lainnya yang penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi/deflasi. Kenaikan perubahan harga yang terjadi di masyarakat disebut dengan inflasi, sedangkan perubahan harga yang menurun disebut dengan deflasi. Tingginya perubahan harga atau inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat.

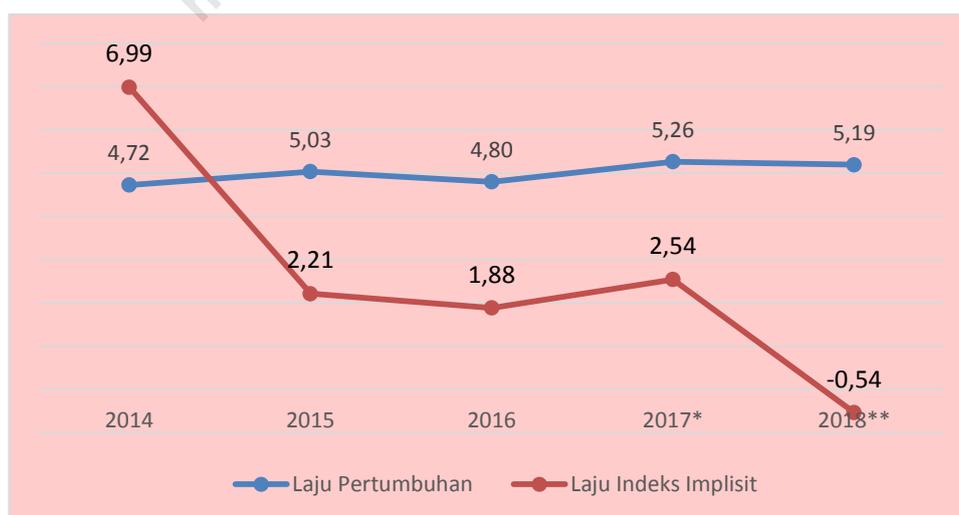
Tabel 3.5 Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,78	5,93	6,48	7,20	4,65
2. Konsumsi LNPRT	7,21	7,49	7,24	5,87	7,60
3. Konsumsi Pemerintah	4,94	6,46	9,61	4,39	4,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,42	5,57	9,51	9,27	3,55
5. Perubahan Inventori	8,58	-7,61	5,13	12,00	-4,44
6. Ekspor	-10,88	-0,70	0,27	-3,10	12,12
7. Impor	-14,81	-0,01	4,59	-1,46	20,58
PDRB	6,99	2,21	1,88	2,54	-0,54

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Penghitungan PDRB menghasilkan tingkat perubahan harga yang dikenal dengan *deflator* PDRB. *Deflator* PDRB didasarkan pada penghitungan yang mengandung seluruh barang yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga *deflator* PDRB merupakan indeks harga yang berbasis luas yang seringkali digunakan untuk mengukur inflasi.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Perubahan harga untuk berbagai komponen PDRB menurut pengeluaran dapat diukur dengan laju indeks implisit. Indeks implisit pada PDRB menurut pengeluaran



merupakan perbandingan antara komponen-komponen PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstan 2010. Laju indeks implisit PDRB yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) selama tahun 2014-2018 memiliki nilai positif dengan besaran yang berfluktuatif setiap tahunnya. Nilai laju implisit positif menunjukkan terjadinya peningkatan harga, begitu juga sebaliknya. Nilai laju indeks implisit tertinggi selama kurun waktu 2014-2018 di Kabupaten Bangka Barat terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,99 persen sedangkan nilai laju implisit terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar -0,54 persen.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat menurut pengeluaran. Sebagian besar produk barang dan jasa yang tercipta digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2014-2018, perkembangan konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 41,15 persen dan meningkat menjadi 48,83 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2018, nilai komponen konsumsi rumah tangga adalah sebesar 6.456 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 5.700 miliar rupiah.

Membaiknya perkembangan ekonomi yang terjadi telah mendorong pendapatan dari rumah tangga ikut membaik, hal ini berdampak terhadap perbaikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar rupiah)	4.468	5.010	5.701	6.461	7.118
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	3.349	3.545	3.788	4.006	4.217
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	41,81	43,67	46,54	48,87	51,46
Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga/Tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	90.666	99.338	110.734	122.995	135.105
b. ADHK 2010	67.960	70.294	73.588	76.249	80.035
Rata-rata Konsumsi per Kapita/Tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	23.223	25.484	28.406	31.552	34.058
b. ADHK 2010	17.407	18.033	18.877	19.560	20.175
Pertumbuhan (%)					
a. Konsumsi RT	6,59	5,86	6,86	5,73	5,28
b. Konsumsi per RT	4,31	3,43	4,69	3,62	4,96
c. Konsumsi per Kapita	4,31	3,60	4,68	3,62	3,14
Jumlah RT (unit)	49.279	50.434	51.481	52.532	52.688
Jumlah Penduduk (orang)	192.395	196.598	200.684	204.778	209.011

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 selama kurun waktu lima tahun terakhir. Secara nominal, setiap rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat selama periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan pengeluaran setiap tahunnya. Pada tahun 2014, setiap rumah tangga menghabiskan dana sekitar 90,67 juta rupiah untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 135,10 juta rupiah pada tahun 2018. Sementara itu, dilihat atas dasar harga konstan 2010, selama periode

2014-2018, rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran antara 3-4 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,96 persen.

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Bangka Barat meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita selama tahun 2014-2018 secara riil berkisar antara 3-4 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan selama tahun 2014-2018 cenderung berfluktuatif dari 6,59 persen pada tahun 2014 menjadi 5,28 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,86 persen. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan konsumsi per kapita yang cenderung berfluktuatif dari 4,31 persen pada tahun 2014 menjadi 3,14 persen pada tahun 2018

Tabel 3.7 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	47,12	47,90	48,78	49,40	49,02
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,49	3,37	3,21	3,02	2,94
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,20	17,08	17,37	17,38	17,55
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,01	5,00	4,84	4,95	4,89
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,20	16,63	15,75	15,15	15,53
f. Hotel dan Restoran	8,05	8,10	8,23	8,34	8,44
g. Lainnya	1,92	1,91	1,84	1,76	1,63
Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Secara rata-rata, struktur konsumsi akhir rumah tangga selama tahun 2014-2018 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan rokok. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan, minuman, dan rokok berada pada kisaran 47-49 persen dan cenderung mengalami peningkatan. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 49,40 persen sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 47,12 persen. Proporsi pengeluaran untuk kelompok non makanan yang memiliki kontribusi cukup besar seperti; perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga cenderung meningkat, sedangkan transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya cenderung menurun. Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Dilihat dari pertumbuhan riil-nya, pengeluaran rumah tangga baik untuk kelompok makanan maupun non makanan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berfluktuasi. Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga secara kuantitas atau *volume* dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,01	6,94	7,65	5,80	6,08
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,82	3,85	5,10	2,52	2,52
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,99	4,29	6,57	5,89	5,02
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,33	7,91	5,25	7,55	5,64
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,87	5,12	5,73	5,48	4,14
f. Hotel dan Restoran	6,29	3,64	7,32	5,90	4,97
g. Lainnya	5,76	7,01	5,46	4,95	2,55

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Perkembangan kelompok konsumsi makanan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan kelompok konsumsi makanan pada tahun 2014 sebesar 6,01 persen. Kemudian berfluktuatif hingga pada tahun 2018, laju pertumbuhan kelompok konsumsi makanan mencapai 6,08 persen. Dampak dari pertambahan jumlah penduduk juga mendorong pertumbuhan konsumsi kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2014, kelompok kesehatan dan pendidikan ini tumbuh sebesar 3,33 persen dan pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64 persen, dimana sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 7,55 persen. Adapun untuk kelompok konsumsi lainnya turut mengalami laju pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa faktor musiman seperti liburan sekolah dan perayaan hari besar keagamaan cukup kuat peranannya dalam membentuk pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.9 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap tahun rumah tangga membayar lebih mahal atas barang-barang yang dikonsumsinya, baik itu untuk kelompok makanan maupun non makanan. Jika hal ini tidak diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat, tentunya akan berakibat buruk bagi perekonomian Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,28	6,60	7,63	8,50	3,07
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,24	4,13	3,08	4,21	4,48
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,88	6,76	8,54	7,13	5,91
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,02	3,76	4,63	7,64	3,14
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,31	3,16	1,90	3,38	8,42
f. Hotel dan Restoran	4,92	8,84	7,64	8,48	6,29
g. Lainnya	1,88	4,16	3,59	3,68	-0,71

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Dari berbagai komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran, konsumsi LNPRT merupakan komponen yang mempunyai kontribusi terkecil. Selama periode tahun 2014-2018, kontribusinya di bawah 1 persen. Kecilnya nilai kontribusi ini disebabkan belum banyaknya aktivitas lembaga sosial, kemasyarakatan, organisasi profesi, politik, dan sejenisnya di Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu, peran lembaga non profit perlu ditingkatkan. Pada saat ini telah ada berbagai upaya masyarakat serta sosialisasi di lingkungan masyarakat itu sendiri, yang bertujuan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, khususnya di bidang sosial kemasyarakatan.

**Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

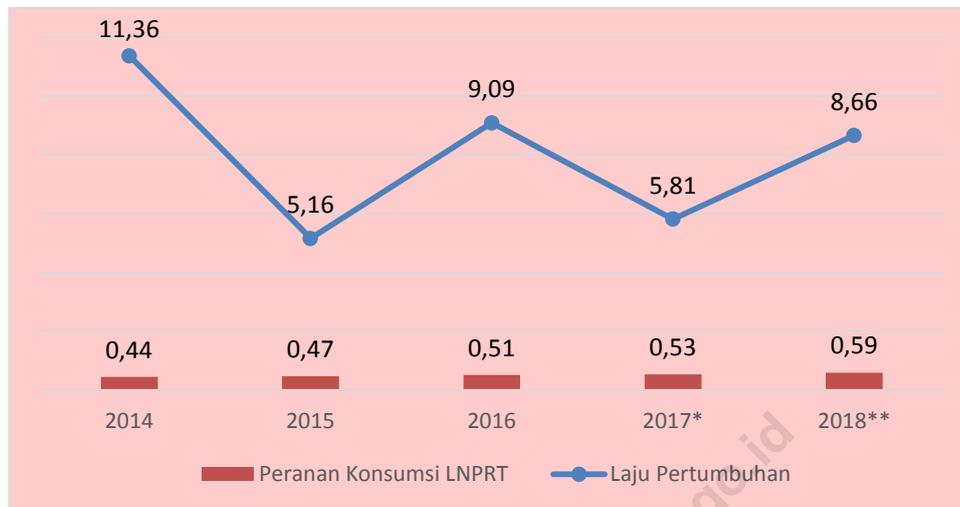
U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (juta rupiah)	47.417	53.598	62.703	70.241	82.122
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	38.334	40.311	43.974	46.529	50.559
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,44	0,47	0,51	0,53	0,59

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Meskipun memiliki kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat, namun peranan konsumsi LNPRT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Peranan yang diciptakan oleh komponen konsumsi LNPRT pada tahun 2018 adalah sebesar 0,59 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,53 persen. Pada tahun 2014, nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga berlaku Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 47.417 juta rupiah, mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 82.122 juta rupiah pada tahun 2018. Demikian halnya dengan nilai konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan dari 38.334 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 50.559 juta rupiah pada tahun 2018. Secara rata-rata, selama kurun waktu 2014-2018, nilai konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat meningkat sebesar 8,02 persen setiap tahunnya.

Secara riil, laju pertumbuhan komponen konsumsi LNPRT di Kabupaten Bangka Barat ini berfluktuatif selama kurun waktu 2014-2018, berkisar antara 5-11 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 11,36 persen. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan konsumsi LNPRT mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir, yaitu tumbuh sebesar 5,16 persen dan pertumbuhannya kembali mengalami peningkatan menjadi 9,09 persen di tahun 2016 dan kembali mengalami perlambatan menjadi 5,81 persen di tahun 2017 hingga mencapai pertumbuhan sebesar 8,66 persen pada 2018.

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi LNPRT Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi di suatu wilayah adalah permintaan pemerintah atas barang dan jasa yang dihasilkan seluruh faktor produksi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah bisa terjadi karena adanya peningkatan permintaan pemerintah atas barang dan jasa yang dihasilkan seluruh faktor produksi wilayah tersebut. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Bangka Barat serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Selama tahun 2014-2018, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 590 miliar rupiah, mengalami peningkatan setiap tahunnya dan di tahun 2018 mencapai 881 miliar rupiah.

Demikian pula halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, pengeluaran akhir konsumsi pemerintah adalah sebesar 461 miliar rupiah, meningkat menjadi 540 miliar rupiah pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas selama kurun waktu tersebut.

Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar rupiah)	590	653	744	825	881
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	461	479	498	529	540
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	5,53	5,69	6,08	6,24	6,37

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Peranan yang disumbangkan oleh komponen konsumsi pemerintah selama kurun waktu 2014-2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2014, peranan konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 5,53 persen, kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi 6,37 persen.

Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Gambaran tentang peningkatan konsumsi akhir pemerintah secara riil baik total maupun rata-rata per penduduk merupakan pendekatan untuk mengukur pemerataan

kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Secara total rata-rata konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang cenderung menurun, namun sempat mengalami peningkatan signifikan pada 2017 yang mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 6,15 persen hingga pada akhirnya kembali menurun lebih dalam pada 2018 sekaligus mengalami pertumbuhan terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu hanya sebesar 2,26 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Perkembangan pembangunan wilayah secara makro tidak terlepas dari perkembangan investasi. Investasi mempunyai keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan investasi maka kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti adanya peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan (*income*). Dalam waktu yang panjang investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). PMTB dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik/kapital (selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga memiliki proporsi sekitar 16-21 persen terhadap total PDRB dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik secara nominal maupun secara riil. Pada tahun 2014, nilai PMTB Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 1.808 miliar rupiah dan memberikan peranan sebesar 16,92 persen terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat. Nilai PMTB mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar 2.913 miliar rupiah atau memberikan peranan sebesar 21,06 persen terhadap total PDRB. Peranan di tahun 2018 ini merupakan peranan tertinggi

selama kurun waktu lima tahun terakhir. Dilihat menurut strukturnya, selama kurun waktu lima tahun terakhir, peranan PMTB struktur nonbangunan lebih tinggi dibandingkan peranan PMTB struktur bangunan.

**Tabel 3.12 Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
a. ADHB (miliar rupiah)	1.808	1.994	2.288	2.663	2.913
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	1.313	1.372	1.437	1.531	1.618
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	16,92	17,38	18,67	20,14	21,06
Struktur PMTB					
a. Bangunan (miliar rupiah)	829	931	1.066	1.239	1.365
(%)	45,87	46,68	46,62	46,52	46,86
b. Nonbangunan (miliar rupiah)	979	1.063	1.221	1.424	1.548
(%)	54,13	53,32	53,38	53,48	53,14
PMTB (miliar rupiah)	1.808	1.994	2.288	2.663	2.913
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	3,49	4,91	5,04	7,23	5,83
b. Nonbangunan	5,79	4,12	4,48	5,94	5,46
PMTB	4,72	4,48	4,74	6,54	5,64

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Secara riil, selama tahun 2014-2018 PMTB mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 6,54 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,48 persen. Nilai PMTB secara riil atau yang dihitung atas

dasar harga konstan pada tahun 2014 adalah sebesar 1.313 miliar rupiah dan pada tahun 2018 menjadi 1.618 miliar rupiah.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing sub komponen juga sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen nonbangunan merupakan sub komponen dengan proporsi lebih besar dalam pembentukan modal tetap bruto yaitu berkisar antara 53-54 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada sub komponen bangunan disebabkan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk belanja modal khususnya pembangunan gedung maupun renovasi gedung dan adanya proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang dianggarkan untuk beberapa tahun (*multiyears*) di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sementara pada sub komponen nonbangunan, pertumbuhan diantaranya disebabkan adanya penambahan mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*).

Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan dan Peranan PMTB Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan sebagai persediaan barang pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan sejenisnya. Sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan sebagai persediaan bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi/barang jadi, suku cadang, barang dalam perjalanan dan sejenisnya. Secara

konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

**Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perubahan Inventori					
a. ADHB (miliar rupiah)	265	256	120	90	101
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	172	180	80	54	63
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	2,48	2,23	0,98	0,68	0,73

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai perubahan inventori cenderung mengalami penurunan, baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan. Pada tahun 2014, nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku adalah sebesar 265 miliar rupiah. Pada tahun 2017, nilai perubahan inventori Kabupaten Bangka Barat atas dasar harga berlaku mencapai nilai terendah sebesar 90 miliar rupiah kemudian meningkat kembali pada 2018 dengan nilai sebesar 101 miliar rupiah. Begitu juga dengan penghitungan atas dasar harga konstan, tahun 2014 nilai perubahan inventori sebesar 172 miliar rupiah kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 63 miliar rupiah.

Gambar 3.7 Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama tahun 2014-2018, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat cenderung mengalami penurunan dari 2,48 persen pada tahun 2014 menjadi 0,68 persen pada tahun 2017, kemudian meningkat lagi sedikit pada tahun 2018 menjadi 0,73 persen. Proporsi perubahan inventori yang cenderung menurun menunjukkan bahwa rantai distribusi atau proses pemasaran barang di Kabupaten Bangka Barat masih berjalan dengan baik, dimana salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan inventori tersebut adalah komoditas timah.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor luar negeri menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Peran perdagangan antar wilayah cukup penting dalam perekonomian suatu daerah. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara penuh akan berusaha mendatangkan barang dan jasa dari daerah/negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa yang melebihi kebutuhan domestik juga terdorong untuk memperluas pemasarannya ke luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, maka produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa juga semakin meningkat, kemajuan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi juga semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa di kabupaten/kota semakin berkembang.

**Tabel 3.14 Perkembangan Ekspor dan Impor
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (miliar rupiah)	15.965	13.565	11.891	15.045	16.669
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	14.923	12.770	11.163	14.576	14.404
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	149,39	118,24	97,07	113,79	120,50
Laju Pertumbuhan (%)	12,30	-14,43	-12,58	30,57	-1,18
Impor Barang dan Jasa					
a. ADHB (miliar rupiah)	12.457	10.059	8.557	11.933	13.931
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	11.908	9.617	7.821	11.068	10.716
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	116,57	87,68	69,85	90,25	100,71
Laju Pertumbuhan (%)	15,11	-19,24	-18,67	41,52	-3,18

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Perkembangan ekspor barang dan jasa di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi selama periode 2014-2018. Pada tahun 2014, nilai ekspor sebesar 15.965 miliar rupiah, menurun hingga menjadi 11.891 miliar rupiah pada 2016, dan kembali naik pada 2017 dan 2018 hingga mencapai 16.669 miliar rupiah pada 2018 dan menjadi nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Secara riil, nilai ekspor atas dasar harga konstan pada tahun 2014 adalah sebesar 14.923 miliar rupiah dimana merupakan nilai tertinggi selama periode 2014-2018 dan menurun hingga menjadi 11.163 miliar rupiah pada 2016, kemudian meningkat lagi hingga 2018 mencapai 14.404 miliar rupiah.

Gambar 3.8 Laju Pertumbuhan dan Peranan Ekspor Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Peranan ekspor di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2014-2018 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2014, peranan ekspor terhadap PDRB mengalami titik tertinggi yaitu sebesar 149,39 persen, menurun menjadi 118,24 persen pada tahun 2017 dan menyentuh titik terendah pada 2016. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya komoditas yang diekspor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Barat, terutama komoditas timah. Namun, secara perlahan peranan ekspor kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 120,50 persen pada 2018.

Gambar 3.9 Laju Pertumbuhan dan Peranan Impor Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat (Persen), 2014-2018



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Sementara itu, impor barang dan jasa selama kurun waktu 2014-2018 juga berfluktuasi. Pada tahun 2014, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku adalah sebesar 12.457 miliar rupiah dan mencapai 13.931 miliar rupiah tahun 2018 sekaligus nilai impor tertinggi selama lima tahun terakhir. Proporsi impor barang dan jasa selama kurun waktu 2014-2018 berkisar antara 69-116 persen terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan domestik di Kabupaten Bangka Barat masih bergantung pada impor dari luar wilayah.

Seharusnya, jika dilihat pada grafik 3.9, impor barang dan jasa selama 2014-2018 cenderung menurun bahkan mengalami pertumbuhan negatif. Namun secara mengejutkan, pada tahun 2017 laju pertumbuhan impor melesat menjadi 41,52 persen.



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BANGKA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2014-2018



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BANGKA BARAT MENURUT PENGELUARAN, 2014-2018

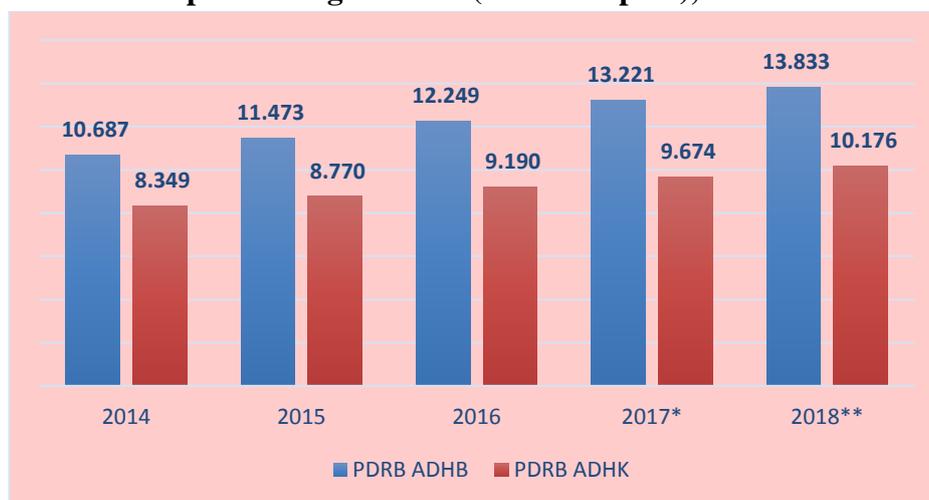
Dalam analisis sosial ekonomi, penggunaan data PDRB sebagai indikator ekonomi makro sering dilakukan di tengah keterbatasan informasi yang tersedia. Dari data PDRB dapat menghasilkan beberapa rasio (perbandingan relatif) untuk melengkapi analisis yang ada, seperti disajikan pada uraian berikut ini.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

PDRB yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran akan menghasilkan data PDRB menurut pengeluaran. Dari series data PDRB menurut pengeluaran tersebut dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB per kapita.

**Gambar 4.1 PDRB per Kapita Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bangka Barat (Miliar Rupiah), 2014-2018**



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Pertumbuhan PDRB perkapita selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 2-3 persen seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tumbuh sekitar 2 persen tiap tahunnya. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan PDRB per Kapita selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDRB per Kapita tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,15 persen.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (miliar rupiah)					
a. ADHB	10.687	11.473	12.249	13.221	13.833
b. ADHK 2010	8.349	8.770	9.190	9.674	10.176
PDRB per Kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	55.546	58.358	61.038	64.565	66.183
b. ADHK 2010	43.396	44.607	45.794	47.240	48.686
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)					
	2,47	2,79	2,66	3,16	3,06
Jumlah Penduduk (orang)					
	192.395	196.598	200.684	204.778	209.011
Pertumbuhan (%)					
	2,19	2,18	2,08	2,04	2,07

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Bangka Barat, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain atau kabupaten/kota lain.



Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	4.468	5.010	5.701	6.461	7.118
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	15.965	13.565	11.891	15.045	16.669
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap Ekspor	0,28	0,37	0,48	0,43	0,43

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa selama tahun 2014-2018 produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga berkisar antara 0,28 – 0,48 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik digunakan untuk ekspor, sisanya diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,48 dan terendah pada tahun 2014 sebesar 0,28. Selama periode tahun 2014-2018, rasio antara konsumsi rumah tangga dan ekspor terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang lebih besar dari pada peningkatan nilai ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan *volume* maupun harga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 yang menyajikan perbandingan konsumsi rumah tangga dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam kurun waktu 2014-2018, secara rata-rata rasio yang tercipta di atas 2. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang tersedia (*supply*) lebih banyak digunakan untuk memenuhi permintaan akhir rumah tangga sekitar 2 kali daripada permintaan untuk investasi fisik (PMTB). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah berkembang dengan tingkat konsumsi rumah tangga di atas investasi.

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	4.468	5.010	5.701	6.461	7.118
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	1.808	1.994	2.288	2.663	2.913
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap PMTB	2,47	2,51	2,49	2,43	2,44

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,51 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 2,43 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,49 persen.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari domestik maupun impor) dalam menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, Lembaga Non Profit Rumah Tangga, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran konsumsi akhir kabupaten Bangka Barat secara nominal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 pengeluaran konsumsi akhir tercatat sebesar 4.504 miliar rupiah meningkat menjadi 7.367 miliar rupiah di tahun 2017. Hal ini seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2014-2018.



**Tabel 4.4 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)					
a. Rumah Tangga	4.468	5.010	5.701	6.461	7.118
b. LNPRT	47	54	63	70	82
c. Pemerintah	590	653	744	825	881
Jumlah	5.106	5.717	6.508	7.356	8.082
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	10.687	11.473	12.249	13.221	13.833
Proporsi	47,78	49,83	53,13	55,64	58,42

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di Kabupaten Bangka Barat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Peningkatan konsumsi akhir setiap tahunnya dalam kurun waktu 2014-2018, diikuti peningkatan proporsinya terhadap PDRB. Pada tahun 2014, proporsi konsumsi akhir Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 47,78 persen, meningkat menjadi 58,42 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan akan produk yang dihasilkan untuk memenuhi konsumsi domestik. Dengan kata lain, produk yang tidak digunakan untuk konsumsi akhir, antara lain untuk investasi fisik (PMTB) atau untuk dieskpor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Barat memiliki peran yang lebih kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di Kabupaten Bangka Barat, tetapi diperdagangkan ke luar negeri atau luar daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5 Rasio Ekspor Terhadap PMTB (ADHB)

Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	15.965	13.565	11.891	15.045	16.669
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	1.808	1.994	2.288	2.663	2.913
Rasio Ekspor Terhadap PMTB	8,83	6,80	5,20	5,65	5,72

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama tahun 2014-2018, produk domestik yang diekspor berkisar antara 5-8 kali lebih besar dari PMTB. Pada tahun 2014 rasio ekspor terhadap PMTB sebesar 8,83; kemudian cenderung mengalami penurunan hingga menjadi 5,72 pada 2018. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio disebabkan oleh kenaikan ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PMTB. Demikian pula sebaliknya, penurunan rasio disebabkan oleh penurunan ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) Kabupaten Bangka Barat dengan produk yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain atau kabupaten/kota lain. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB Kabupaten Bangka Barat terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain, provinsi lain atau kabupaten/kota lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.



**Tabel 4.6 Rasio PDRB Terhadap Impor
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	10.687	11.473	12.249	13.221	13.833
Impor (ADHB) (miliar rupiah)	12.457	10.059	8.557	11.933	13.931
Rasio PDRB Terhadap Impor	0,86	1,14	1,43	1,11	0,99

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama tahun 2014-2018, rasio PDRB terhadap impor cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2014, rasio PDRB terhadap impor sebesar 0,86; kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi 1,43; namun kembali mengalami penurunan dari pada 2017 dan 2018 menjadi 1,11 dan 0,99.

4.7 KESEIMBANGAN PENYEDIAAN DAN PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bangka Barat oleh produk yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain atau kabupaten/kota lain. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, selama tahun 2014-2018 sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, provinsi lain atau kabupaten/kota lain, yaitu berkisar antara 41-53 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 47-59 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat cenderung meningkat, dari 23.144 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 27.765 miliar rupiah pada tahun 2018.

**Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	10.687	11.473	12.249	13.221	13.833
%	46,17	53,28	58,87	52,56	49,82
Impor (ADHB) (miliar rupiah)	12.457	10.059	8.557	11.933	13.931
%	53,83	46,72	41,13	47,44	50,18
<u>Permintaan Akhir</u> (miliar rupiah)	23.144	21.532	20.806	25.154	27.765
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Dari sisi penyediaan, produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 10.687 miliar rupiah pada tahun 2014, 11.473 miliar rupiah pada tahun 2015, 12.249 miliar rupiah pada tahun 2016, 13.221 miliar rupiah pada tahun 2017, dan 13.833 miliar rupiah pada tahun 2018. Mengingat produk Kabupaten Bangka Barat tersebut tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka untuk memenuhinya didatangkan berbagai produk barang dan jasa yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain maupun kabupaten/kota lain yaitu sebesar 12.457 miliar rupiah pada tahun 2014, 10.059 miliar rupiah pada tahun 2015, 8.557 miliar rupiah pada tahun 2016, 11.933 miliar rupiah pada tahun 2017, dan 13.931 pada tahun 2018.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Ekspor-impor barang dan jasa didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi, baik berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah atas barang dan jasa antara residen kabupaten/kota dengan pelaku ekonomi non residen yang berasal dari luar kabupaten/kota, baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56)

Net ekspor merupakan selisih antara ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa. Jika nilai ekspor positif dapat diartikan neraca perdagangan

mengalami surplus. Sebaliknya, jika net ekspor negatif maka neraca perdagangan mengalami defisit.

**Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	15.965	13.565	11.891	15.045	16.669
Impor (ADHB) (miliar rupiah)	12.457	10.059	8.557	11.933	13.931
Net Ekspor (X – M) (miliar rupiah)	3.508	3.506	3.334	3.112	2.737
Peranan Net Ekspor (%)	32,82	30,56	27,22	23,54	19,79
Ekspor (ADHK) (miliar rupiah)	14.923	12.770	11.163	14.576	14.404
Impor (ADHK) (miliar rupiah)	11.908	9.617	7.821	11.068	10.716
Net Ekspor (ADHK) (miliar rupiah)	3.015	3.153	3.342	3.508	3.687
Laju Pertumbuhan Net Ekspor (%)	2,42	4,57	6,00	4,95	5,11

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Neraca perdagangan Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2014-2018 berdasarkan harga berlaku dan konstan selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa di Kabupaten Bangka Barat dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari nilai impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “tabungan”. Surplus perdagangan Kabupaten Bangka Barat yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 2.737 miliar rupiah.

Peranan yang diberikan oleh komponen net ekspor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2014-2018 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 peranan net ekspor sebesar 32,82 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 19,79 persen.

Pertumbuhan net ekspor pada tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Meskipun demikian, selama kurun waktu 2014-2018 pertumbuhan net ekspor selalu menunjukkan arah yang positif. Hal ini disebabkan karena permintaan komoditi ekspor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Barat cukup tinggi, sehingga mendorong ekspor mengalami peningkatan. Pertumbuhan net ekspor pada tahun 2014 sebesar 2,42 persen, sedangkan pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,11 persen.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”nilai tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit, dengan formula sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1



**Tabel 4.9 Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Bangka Barat, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	8.349	8.770	9.190	9.674	10.176
Perubahan (miliar rupiah)	376	420	421	484	502
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1.313	1.372	1.437	1.531	1.618
ICOR	3,49	3,26	3,42	3,17	3,22

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa selama tahun 2014-2018 besaran ICOR cenderung berfluktuasi. Terjadi penurunan dari 3,49 pada tahun 2014 hingga menjadi 3,22 pada tahun 2018. Nilai ICOR sebesar 3,22 pada tahun 2018 menunjukkan bahwa untuk menaikkan output sebesar 1 miliar rupiah, membutuhkan investasi sebesar 3,22 miliar rupiah. Namun pada kenyataannya, penambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor lain selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

- a. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014-2018 dapat menggambarkan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat pada periode bersangkutan. Berbeda dengan analisis ekonomi dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi, analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- b. Analisis yang disajikan merupakan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antar daerah. Analisis tersebut didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Dengan menambahkan beberapa indikator sosial demografi, seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai pemerintah, hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- c. Penyajian data dalam publikasi ini dalam bentuk *series*, yaitu dari tahun 2014-2018. Hal ini untuk memudahkan dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Satuan dari masing-masing parameter juga berbeda-beda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- d. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan bahan acuan dalam melakukan pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain, seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana.
- e. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*), provinsi lain ataupun kabupaten/kota secara agregat disajikan di sini, dalam bentuk transaksi ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan

ekonomi Kabupaten Bangka Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*), provinsi lain, maupun kabupaten/kota lainnya.

<https://bangkabaratkab.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://bangkabarat.go.id>



Lampiran 1.

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),
2014–2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.467.921	5.010.037	5.700.690	6.461.162	7.118.429
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	2.105.250	2.399.914	2.780.627	3.191.820	3.489.745
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	156.022	168.714	182.788	195.283	209.170
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	768.638	855.802	989.955	1.123.005	1.249.076
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	223.905	250.712	276.092	319.633	348.236
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	768.299	833.161	897.638	978.831	1.105.203
1.6 Hotel dan Restoran	359.829	405.905	468.909	538.684	601.019
1.7 Lainnya	85.977	95.830	104.682	113.906	115.980
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	47.417	53.598	62.703	70.241	82.122
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	590.482	652.944	744.382	824.850	880.976
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.808.137	1.994.440	2.287.534	2.663.055	2.913.145
4.1 Bangunan	829.477	930.998	1.066.395	1.238.978	1.365.203
4.2 Nonbangunan	978.659	1.063.442	1.221.139	1.424.077	1.547.943
5. Perubahan Inventori	265.205	256.146	119.914	90.118	101.079
6. Ekspor	15.964.808	13.565.160	11.890.831	15.044.615	16.668.798
7. Impor	12.457.262	10.059.300	8.556.622	11.932.613	13.931.480
PDRB	10.686.708	11.473.024	12.249.433	13.221.427	13.833.070

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 2.

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),
2014–2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.348.991	3.545.187	3.788.401	4.005.523	4.216.864
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	1.582.587	1.692.393	1.821.853	1.927.520	2.044.664
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	116.145	120.616	126.767	129.962	133.237
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	561.626	585.746	624.232	660.999	694.152
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	171.129	184.665	194.368	209.043	220.825
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	573.733	603.107	637.666	672.610	700.469
1.6 Hotel dan Restoran	273.482	283.443	304.196	322.144	338.150
1.7 Lainnya	70.288	75.217	79.320	83.246	85.367
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	38.334	40.311	43.974	46.529	50.559
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	460.906	478.735	497.932	528.555	540.490
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.313.478	1.372.342	1.437.358	1.531.346	1.617.658
4.1 Bangunan	605.657	635.373	667.383	715.635	757.375
4.2 Nonbangunan	707.821	736.969	769.975	815.711	860.282
5. Perubahan Inventori	172.222	180.045	80.175	53.798	63.146
6. Ekspor	14.923.460	12.769.525	11.163.366	14.576.158	14.403.501
7. Impor	11.908.131	9.616.502	7.821.007	11.068.200	10.716.409
PDRB	8.349.260	8.769.643	9.190.201	9.673.709	10.175.809

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara



Lampiran 3.

**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Persen), 2014–2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	41,81	43,67	46,54	48,87	51,46
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	19,70	20,92	22,70	24,14	25,23
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	1,46	1,47	1,49	1,48	1,51
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,19	7,46	8,08	8,49	9,03
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	2,10	2,19	2,25	2,42	2,52
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,19	7,26	7,33	7,40	7,99
1.6 Hotel dan Restoran	3,37	3,54	3,83	4,07	4,34
1.7 Lainnya	0,80	0,84	0,85	0,86	0,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,44	0,47	0,51	0,53	0,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,53	5,69	6,08	6,24	6,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,92	17,38	18,67	20,14	21,06
4.1 Bangunan	7,76	8,11	8,71	9,37	9,87
4.2 Nonbangunan	9,16	9,27	9,97	10,77	11,19
5. Perubahan Inventori	2,48	2,23	0,98	0,68	0,73
6. Ekspor	149,39	118,24	97,07	113,79	120,50
7. Impor	116,57	87,68	69,85	90,25	100,71
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 4.

**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Persen), 2014–2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	40,11	40,43	41,22	41,41	41,44
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	18,95	19,30	19,82	19,93	20,09
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	1,39	1,38	1,38	1,34	1,31
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,73	6,68	6,79	6,83	6,82
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	2,05	2,11	2,11	2,16	2,17
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,87	6,88	6,94	6,95	6,88
1.6 Hotel dan Restoran	3,28	3,23	3,31	3,33	3,32
1.7 Lainnya	0,84	0,86	0,86	0,86	0,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,46	0,46	0,48	0,48	0,50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,52	5,46	5,42	5,46	5,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,73	15,65	15,64	15,83	15,90
4.1 Bangunan	7,25	7,25	7,26	7,40	7,44
4.2 Nonbangunan	8,48	8,40	8,38	8,43	8,45
5. Perubahan Inventori	2,06	2,05	0,87	0,56	0,62
6. Ekspor	178,74	145,61	121,47	150,68	141,55
7. Impor	142,62	109,66	85,10	114,42	105,31
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 5.

**Laju Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (persen), 2014–2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,82	12,13	13,79	13,34	10,17
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	12,67	14,00	15,86	14,79	9,33
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	14,54	8,13	8,34	6,84	7,11
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,49	11,34	15,68	13,44	11,23
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	11,61	11,97	10,12	15,77	8,95
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,83	8,44	7,74	9,05	12,91
1.6 Hotel dan Restoran	11,52	12,80	15,52	14,88	11,57
1.7 Lainnya	7,75	11,46	9,24	8,81	1,82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	19,39	13,03	16,99	12,02	16,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,61	10,58	14,00	10,81	6,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,63	10,30	14,70	16,42	9,39
4.1 Bangunan	9,85	12,24	14,54	16,18	10,19
4.2 Nonbangunan	21,02	8,66	14,83	16,62	8,70
5. Perubahan Inventori	19,23	-3,42	-53,19	-24,85	12,16
6. Ekspor	0,09	-15,03	-12,34	26,52	10,80
7. Impor	-1,93	-19,25	-14,94	39,45	16,75
PDRB	12,04	7,36	6,77	7,94	4,63

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 6.

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (persen), 2014–2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,59	5,86	6,86	5,73	5,28
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	6,01	6,94	7,65	5,80	6,08
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	7,82	3,85	5,10	2,52	2,52
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,99	4,29	6,57	5,89	5,02
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	3,33	7,91	5,25	7,55	5,64
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,87	5,12	5,73	5,48	4,14
1.6 Hotel dan Restoran	6,29	3,64	7,32	5,90	4,97
1.7 Lainnya	5,76	7,01	5,46	4,95	2,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,36	5,16	9,09	5,81	8,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,45	3,87	4,01	6,15	2,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,72	4,48	4,74	6,54	5,64
4.1 Bangunan	3,49	4,91	5,04	7,23	5,83
4.2 Nonbangunan	5,79	4,12	4,48	5,94	5,46
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	12,30	-14,43	-12,58	30,57	-1,18
7. Impor	15,11	-19,24	-18,67	41,52	-3,18
PDRB	4,72	5,03	4,80	5,26	5,19

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara



Lampiran 7.

**Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Barat Menurut Pengeluaran (persen),
2014–2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	133,41	141,32	150,48	161,31	168,81
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	133,03	141,81	152,63	165,59	170,68
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	134,33	139,88	144,19	150,26	156,99
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	136,86	146,10	158,59	169,90	179,94
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	130,84	135,77	142,05	152,90	157,70
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	133,91	138,14	140,77	145,53	157,78
1.6 Hotel dan Restoran	131,57	143,21	154,15	167,22	177,74
1.7 Lainnya	122,32	127,40	131,97	136,83	135,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	123,69	132,96	142,59	150,96	162,43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	128,11	136,39	149,49	156,06	163,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	137,66	145,33	159,15	173,90	180,08
4.1 Bangunan	136,95	146,53	159,79	173,13	180,25
4.2 Nonbangunan	138,26	144,30	158,59	174,58	179,93
5. Perubahan Inventori	153,99	142,27	149,56	167,51	160,07
6. Ekspor	106,98	106,23	106,52	103,21	115,73
7. Impor	104,61	104,60	109,41	107,81	130,00
PDRB	128,00	130,83	133,29	136,67	135,94

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 8.

**Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Barat Menurut Pengeluaran (persen),
2014–2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,78	5,93	6,48	7,20	4,65
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	6,28	6,60	7,63	8,50	3,07
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	6,24	4,13	3,08	4,21	4,48
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,88	6,76	8,54	7,13	5,91
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	8,02	3,76	4,63	7,64	3,14
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,31	3,16	1,90	3,38	8,42
1.6 Hotel dan Restoran	4,92	8,84	7,64	8,48	6,29
1.7 Lainnya	1,88	4,16	3,59	3,68	-0,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,21	7,49	7,24	5,87	7,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,94	6,46	9,61	4,39	4,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,42	5,57	9,51	9,27	3,55
4.1 Bangunan	6,14	6,99	9,05	8,35	4,12
4.2 Nonbangunan	14,40	4,37	9,91	10,08	3,07
5. Perubahan Inventori	8,58	-7,61	5,13	12,00	-4,44
6. Ekspor	-10,88	-0,70	0,27	-3,10	12,12
7. Impor	-14,81	-0,01	4,59	-1,46	20,58
PDRB	6,99	2,21	1,88	2,54	-0,54

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bangkabaratkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Telp/Fax : (0716) 732306/7323068

Homepage : <http://bangkabaratkab.bps.go.id> Email: bps1903@bps.go.id

